Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

Dari Sarekat Dagang Islam ke Gerakan Nasional: Perkembangan Sarekat Islam dan Perlawanan Masyarakat Bumiputra pada Masa Kolonial 1912-1918

Intan Cahaya Lestari
UIN Sunan Ampel Surabaya
intanchylstr@gmail.com
Imam Ibnu Hajar
UIN Sunan Ampel Surabaya
ibnuhajar@uinsa.ac.id

Abstrak: Penelitian ini membahas perkemangan Sarekat Dagang Islam (SDI) menjadi Sarekat Islam (SI) pada 1912-1918 dengan fokus pada ragam respons kooperatif dan konfrontatif organisasi ini terhadap kekuasaan kolonial. Tujuannya adalah menjelaskan perkembangan SI dari SDI, peran sosial-ekonomi SI bagi masyarakat Bumiputra, serta bentuk respons dan perbedaan strategi politik yang muncul di dalam SI. penelitian inii menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, dengan pendekatan sosial-ekonomi dan teori solidaritas kelompok (*'ashabiyyah*) Ibnu Khaldun. Sumber primer berupa dua surat kabar kolonial sezaman, yaitu *Bredasche Courant* (17 Juli 1914) dan *Het Kolonial Weekblad* (8 Januari 1914), yang dibaca bersama kajian terdahulu tentang *Oetoesan Hindia* dan tentang SI. hasil penelitian menunjukkan bahwa SI tumbuh dari perkumpulan dagang menjadi organisasi massa yang bertumpu pada solidaritas keislaman, saling menolong, koperasi, pendidikan, dan penyampaian keluhan. Solidaritas itu menggerakkan dua ragam respons terhadap kolonialisme. Respons kooperatif ditempuh pimpinan pusat melalui tuntutan kepada pemerintah dan keterlibatan dalam Volksraad, sedangkan respons konfrontatif muncul di tingkat cabang, terutam Semarang, berupa demonstrasi, pemogokan, dan tuntutan terbuka. Perbedaan strategi itu tampak dalam perselisihan tentang Volksraad dan *Indie Weerbaar* pada 1917 dan menjadi benih perpecahan di dalam SI.

Kata Kunci: *Sarekat Islam; Sarekat Dagang Islam; respons kooperatif; respons konfrontatif, 'ashabiyyah; masa kolonial*

PENDAHULUAN

Awal abad ke-20 ditandai dengan tumbuhnya organiasi pergerakan di Hindia Belanda, dan Sarekat Islam (SI) menonjol karena berkembang dari perkumpulan dagang menjadi organisasi massa yang luas pengaruhnya. Pada masa awal, Sarekat Dagang Islam (SDI), yang kemudian menjadi SI, berkaitan dengan persaingan dagang antara pedaganag Bumiputra dan pedagang Tionghoa (Muryanti, 2010). Seiring waktu, SI yang semula

dibentuk untuk mengatasi masalah ekonomi penduduk Bumiputra bergerak ke arah politik dengan tujuan pemerintahan sendiri. Arah itu tampak pada Kongres Nasional 1916 yang membahas pembentukan Volksraad dan pertahanan Hindia Belanda (Setiawati dkk., 2020).

Di sisi lain, SI tetap menjadi wadah bagi persoalan ekonomi dan sosial Bumiputra. *Oetoesan Hindia*, organ SI di Surabaya, bukan hanya corong politik, melainkan juga infrastruktur ekonomi bagi komunitas Bumiputra pada masa ketika Perang Dunia I menghambat impor barang Eropa (Nirmalasari, 2026). Surat kabar itu juga memberitakan kritik terhadap pemerintah kolonial dan persoalan soasial-ekonomi Bumiputra (Slasabila, 2026). Pada saat yang sama, SI menghadapi perbedaan arah di dalam organisasi. Di Semarang, pengaruh sosialisme-revolusioner meradiklakan SI terhadap kekuasaan kolonial tidak seragam. Sebagian memilih bekerja bersama pemerintah untuk menuntut perbaikan, sebagian lain memilih tuntutan dan aksi terbuka.

Tulisan ini memakai istilah respons kooperatif untuk sikap dan tindakan yang menampuh saluran yang disediakan atau diakui pemerintah kolonial, misalnya menyampaikan tuntutan secara resmi dan duduk di Volksraad. Respons konfrontatif dipakai untuk sikap dan tindakan yang menekan pemerintah secara terbuka, misalmnya demonstrasi, pemogokan, dan rapat terbuka. Kedua istilah ini bersifat analitis dan bukan istilah yang dipakai tokoh-tokoh Si pada masanya. Perlawanan di sini juga dipahami secara luas, tidak hanya sebagai aksi terbuka. Ia hadir pula dalam retorika pers dan dalam tafsir yang saling bertentangan atas ucapan politik. Surat kabar sezaman *Bredasche Courant* terbitan 17 Juli 1914, pada rubrik "*Van De Sarekat Islam*", memperlihatkan hal ini. Artikelnya menguip *Soerabaiasch Handelsblad* tentang perhatian pihak kehakiman terhadap sebuah ucapan dalam *Oetoesan Hindia*. Sumber ini ditulis dari sudut pandang kolonial sehingga menunjukkan bagaimana pers SI diawasi dan ditafsirkan sebagai ancaman, bukan semata-mata apa yang dimaksud oleh SI sendiri.

Penelitian terdahulu telah membahas SI dari berbagai sisi. Dalam historiografi nasional, SI umumnya ditempatkan sebagai salah satu organisasi pergerakan awal pasa masa kebnagkitan nasional (Poesponegoro & Notosusanto, 2008), dan dalam kajian tenang Islam modernis Si dibahas sebagai bagian dari gerakan Islam modernis di Hindia (Noer, 1973). Kajian yang lebih luas menempatkan SI sebagai gerakan massa pertama di Hindia Belanda (Korver, 1982) dan menelusuri radikalisme rakyat di Jawa pada 1912-1926 (Siraishi, 1990). Gerakan politik SI pada 1916-1921 telah dikaji (Setiawati dkk.,

2020), begitu pula munculnya dan pecahnya SI Semarang (Muryanti, 2010) dan gerakan SI di Bandung dalam pemberitaan *Kaoem Moeda* tahun 1912–1918 (Nurrohman, 2023). *Oetoesan Hindia* juga telah diteliti, baik dari sisi iklan dan aktivitas ekonomi bumiputra (Nirmalasari, 2026) maupun pemberitaan pergerakan dan solidaritas Islam (Salsabila, 2026). Hubungan SI dengan sosialisme-revolusioner dibahas dalam kajian tentang awal komunisme di Indonesia (McVey, 1965). Meski demikian, dimensi ekonomi rakyat dan perbedaan respons di dalam SI masih perlu dilihat dalam satu alur. Tulisan ini berbeda karena menghubungkan perkembangan SI dari SDI, perannya sebagai wadah persoalan ekonomi dan sosial, dan ragam respons kooperatif dan konfrontatif untuk periode 1912–1918, serta menambahkan sudut pandang pers kolonial sezaman.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan penelitian tulisan ini dibatasi pada kurun 1912–1918, yaitu sejak SDI berubah menjadi SI sampai Kongres Nasional ketiga SI pada 1918. Asal-usul SDI yang lebih awal hanya diringkas sebagai latar. Pertanyaan itu dirumuskan sebagai berikut. Pertama, bagaimana SDI berkembang menjadi SI selama 1912–1918? Kedua, bagaimana peran sosial-ekonomi SI bagi masyarakat bumiputra pada kurun yang sama? Ketiga, bagaimana ragam respons kooperatif dan konfrontatif terhadap pemerintah kolonial muncul melalui SI pada 1912–1918, dan apa yang membedakan strategi politik di antara keduanya? Tujuannya adalah menjelaskan ketiga hal tersebut. Tulisan ini diharapkan memberi gambaran yang lebih utuh tentang SI pada masa awalnya bagi kajian sejarah pergerakan nasional, sekaligus menunjukkan manfaat membaca pers kolonial bersama pers pergerakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah (*historical method*) untuk mengkaji perkembangan Sarekat Dagang Islam (SDI) menjadi Sarekat Islam (SI) serta ragam respons masyarakat bumiputra terhadap kekuasaan kolonial pada kurun 1912–1918. Metode ini digunakan untuk menganalisis perubahan SDI menjadi SI, peran sosial-ekonomi SI bagi masyarakat bumiputra, dan bentuk respons kooperatif dan konfrontatif yang muncul melalui SI di tengah perubahan situasi politik kolonial (Kuntowijoyo, 2013). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosial-ekonomi untuk melihat bagaimana persoalan ekonomi dan sosial bumiputra membentuk perkembangan dan sikap SI.

Penelitian dilakukan melalui empat tahapan metode sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Hajar dkk, 2026). Tahap heuristik dilakukan

dengan mengumpulkan sumber yang berkaitan dengan SDI dan SI pada 1912–1918. Sumber primer yang digunakan adalah dua surat kabar kolonial sezaman. Pertama, *Bredasche Courant* terbitan 17 Juli 1914 pada rubrik "Van de Sarekat Islam", yang diperoleh melalui arsip digital Delpher. Kedua, *Het Koloniaal Weekblad* nomor 2 tanggal 8 Januari 1914, terbitan Vereeniging "Oost en West" di Den Haag, pada artikel "Van bedenkelijke Moraal", yang diperoleh dari koleksi digital KITLV pada Perpustakaan Universitas Leiden. Sumber sekunder berupa artikel jurnal, skripsi, tesis, dan buku mengenai SI, termasuk penelitian tentang surat kabar pergerakan seperti *Oetoesan Hindia* dan *Kaoem Moeda*. Kajian atas *Oetoesan Hindia* (Nirmalasari, 2026; Salsabila, 2026) dimanfaatkan sebagai pembanding dari sisi pergerakan karena penelitinya meneliti langsung isi surat kabar tersebut.

Tahap kedua adalah kritik sumber untuk menguji keaslian dan kredibilitas sumber. Kritik ekstern dilakukan dengan memeriksa jenis, asal, dan waktu terbit sumber. Kedua surat kabar terbit pada 1914 dan merupakan sumber sezaman. Namun kedua artikel itu hanya menyebut atau mengutip *Oetoesan Hindia* melalui surat kabar lain, termasuk *Soerabaiasch Handelsblad*, sehingga bukan teks asli surat kabar SI. Karena itu penelitian ini mencatat bahwa isi kutipan bisa berbeda dari teks aslinya. Penelusuran edisi asli *Oetoesan Hindia* belum dapat dilakukan dalam penelitian ini dan diakui sebagai keterbatasan. Kritik intern dilakukan dengan menilai isi dan sudut pandang penulis. Kedua artikel ditulis dari pihak yang berpihak pada pemerintah kolonial, sehingga nadanya curiga terhadap pers dan pimpinan SI. Informasi di dalamnya dibaca sebagai gambaran pengawasan dan penilaian kolonial terhadap SI. Kedua sumber dibandingkan satu sama lain dan dengan temuan penelitian terdahulu untuk menguji kesesuaiannya, tanpa menggeneralisasi dari dua artikel.

Tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu menafsirkan fakta sejarah yang telah melalui kritik sumber. Fakta mengenai perkembangan SI, peran SI bagi masyarakat bumiputra, dan bentuk respons terhadap pemerintah kolonial disusun berdasarkan kronologi dan hubungan sebab akibat. Interpretasi menggunakan teori sejarah dalam kerangka sejarah peradaban Islam, yaitu gagasan solidaritas kelompok (*'ashabiyyah*) dari Ibn Khaldun (1967), untuk melihat bagaimana ikatan keislaman memperkuat solidaritas masyarakat bumiputra dalam menghadapi persaingan dagang dan tekanan kolonial. Solidaritas dibaca pada tiga tataran. Pertama, sebagai ikatan pemersatu, yaitu Islam dan prinsip saling menolong. Kedua, sebagai kerja sama nyata anggota, yaitu koperasi,

sekolah, pers, dan penyampaian keluhan. Ketiga, sebagai dasar aksi, yaitu tuntutan, demonstrasi, dan keterlibatan dalam lembaga kolonial. Dengan tiga tataran ini penelitian melihat bagaimana solidaritas yang sama dapat melahirkan strategi yang berbeda ketika dasar kepentingan para pelakunya berbeda.

Tahap keempat adalah historiografi, yaitu penulisan hasil penelitian berdasarkan fakta dan interpretasi yang telah diperoleh. Penulisan disusun secara kronologis dan tematis dalam tiga pokok pembahasan, yaitu perkembangan SI pada 1912–1918, peran sosial-ekonomi SI, serta bentuk perlawanan dan perbedaan strategi politik di dalam SI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan disusun dalam tiga bagian yang mengikuti pertanyaan penelitian, yaitu perkembangan SI pada 1912–1918, peran sosial-ekonomi SI, dan bentuk perlawanan serta perbedaan strategi politik SI. Solidaritas kelompok (*'ashabiyyah*) dipakai sebagai benang merah. Pada bagian pertama, solidaritas dibaca sebagai ikatan yang memperluas SDI menjadi SI. Pada bagian kedua, ia dibaca sebagai sumber daya yang digerakkan melalui tolong-menolong, koperasi, dan pers. Pada bagian ketiga, ia dibaca sebagai dasar aksi sekaligus titik rawan ketika anggota SI memilih strategi yang berbeda terhadap pemerintah kolonial.

Perkembangan Sarekat Islam 1912–1918

Asal-Usul Sarekat Dagang Islam

Sarekat Islam (SI) bermula sebagai perkumpulan pedagang muslim menengah bernama Sarekat Dagang Islam (SDI), yang dikaitkan dengan Haji Samanhudi, seorang pengusaha batik di Laweyan, Solo. Berdirinya SDI dijelaskan oleh beberapa sebab, yaitu monopoli perdagangan batik oleh saudagar Tionghoa, sikap diskriminatif pemerintah Belanda, dan kristenisasi oleh Zending (Setiawati dkk., 2020). Tujuan awalnya bersifat ekonomi, yaitu bersaing dagang dengan pedagang Tionghoa (Muryanti, 2010:21).

Sumber-sumber berbeda dalam menyebut waktu berdirinya. Ada yang menyebut akhir 1911 (Setiawati dkk., 2020), ada pula yang menyebut September 1906 dengan bantuan R.M. Tirtoadisuryo, lalu pengakuan pemerintah kolonial pada 1911 dengan banyak halangan, seperti larangan mengadakan rapat umum (Muryanti, 2010:20). Karena perbedaan itu, tulisan ini tidak memastikan satu tahun pendirian SDI dan memusatkan pembahasan pada perubahannya menjadi SI pada 1912. Yang penting bagi pembahasan

ini adalah pola yang tampak dari kedua penjelasan. SDI lahir dari kepentingan bersama sekelompok pedagang muslim yang sama-sama tertekan oleh persaingan dagang dan perlakuan diskriminatif. Dalam kerangka *'ashabiyyah*, kepentingan bersama itulah yang menjadi bahan awal solidaritas, dengan Islam sebagai penanda yang mempertemukan mereka.

Perubahan Menjadi Sarekat Islam dan Sikap Pemerintah Kolonial

Perubahan dari SDI menjadi SI disebut terjadi ketika H.O.S. Tjokroaminoto bergabung. Samanhudi meminta bantuan Tjokroaminoto menyusun anggaran dasar, dan atas sarannya gerakan itu tidak lagi hanya untuk pedagang, melainkan meliputi seluruh golongan masyarakat. Dalam anggaran dasar tersebut kata "dagang" dihapus, dengan tujuan memajukan perdagangan rakyat pribumi, menolong anggota yang kesulitan, memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk asli, serta memajukan agama Islam (Muryanti, 2010:22). Perubahan nama itu dilakukan agar organisasi dapat bergerak tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga bidang lain terutama politik (Setiawati dkk., 2020). Kedua sumber menyebut tanggal akta yang berbeda, yaitu 10 September 1912 (Muryanti, 2010:22) dan 10 November 1912 (Setiawati dkk., 2020), sehingga di sini cukup disebut tahun 1912.

Setelah perubahan itu, SI berkembang pesat. Cabang-cabang berdiri di berbagai daerah di Jawa dan luar Jawa, dan anggotanya pada 1914 disebut mencapai lebih dari 360.000 orang. Perkembangan itu membuat pemerintah kolonial khawatir akan merosotnya wibawanya, sehingga permintaan Tjokroaminoto agar SI diakui sebagai badan hukum ditolak. Pemerintah hanya menerima cabang-cabang yang berdiri sendiri (Muryanti, 2010:22–24). Pengurus Central Sarekat Islam (CSI) baru diakui pemerintah kolonial pada 18 Maret 1916 (Setiawati dkk., 2020). Artinya, selama beberapa tahun SI berkembang sebagai himpunan cabang yang diakui satu per satu, sementara pimpinan pusatnya belum berkedudukan hukum. Keadaan ini perlu diingat ketika membahas perbedaan sikap antara pusat dan cabang pada bagian ketiga.

Kongres, Kohesi Organisasi, dan Arah Politik

Sebelum 1916, SI menyelenggarakan kongres besar di Surabaya (26 Januari 1913), Surakarta (25 Maret 1913), dan Yogyakarta (18–20 April 1914), serta kongres tahunan di Surabaya (26–27 Juni 1915). Pada kongres tahunan 1915 mulai muncul kecenderungan sentrifugal, yaitu kecurigaan sejumlah cabang, terutama di Jawa Barat, terhadap kebijakan keuangan CSI. Tjokroaminoto mengecam kecenderungan pemisahan

diri itu dan menekankan bahwa Islam adalah unsur penyatu organisasi (Setiawati dkk., 2020). Dalam kerangka *'ashabiyyah*, penekanan pada Islam sebagai unsur penyatu itu dapat dibaca sebagai upaya menjaga ikatan bersama ketika kepentingan antarcabang mulai berbeda. Kongres dengan demikian berfungsi ganda. Ia menjadi tempat memperlihatkan kekuatan bersama, sekaligus tempat perbedaan kepentingan pertama kali muncul ke permukaan.

Arah politik SI tampak pada Kongres Nasional pertama di Bandung, 17–24 Juni 1916, yang disebut dihadiri sekitar 800.000 anggota. Pemakaian kata "nasional" dipahami sebagai usaha mewujudkan pemerintahan sendiri, atau setidaknya memberi penduduk pribumi hak bersuara dalam persoalan politik. Kongres itu membahas antara lain usaha pemisahan CSI oleh Gunawan yang didukung Samanhudi, rencana *kweekschool*, pembentukan Dewan Kolonial, tanah partikelir, dan pertahanan Hindia Belanda (*Indie Weerbaar*) (Setiawati dkk., 2020). Meskipun arah menuju pemerintahan sendiri sudah jelas, pada kongres itu belum ada aksi menentang pemerintah. Tjokroaminoto menyatakan bahwa SI tidak menyerukan penyingkiran pemerintah, melainkan bekerja bersama dan mendukung pemerintah untuk menuntut hal-hal yang baik (Muryanti, 2010:30). Dengan demikian, pada 1916 perkembangan SI dari SDI tampak sebagai perluasan tujuan, dari persaingan dagang ke persoalan sosial dan hubungan dengan pemerintah kolonial, dengan cara yang masih kooperatif. Kongres Nasional kedua di Batavia (Oktober 1917) dan ketiga di Surabaya (29 Oktober 1918) memperlihatkan arah yang lebih tajam, sebagaimana dibahas pada bagian ketiga.

Peran Sosial-Ekonomi Sarekat Islam

Tolong-Menolong, Koperasi, dan Pendidikan

SI menjadi populer karena beberapa hal. Pertama, SI menekankan prinsip saling membantu antaranggota yang sedang kesusahan, misalnya membantu biaya penguburan dan ikut dalam selamatan. Kedua, toko kecil, warung, usaha dagang dan angkutan, usaha jahit, serta kerajinan batik diatur secara koperasi oleh anggota untuk menghadapi persaingan dengan orang Tionghoa dan Timur Asing. Ketiga, SI mendirikan sekolah dengan dasar agama Islam bagi pendidikan bumiputra. Keempat, SI menampung keluhan sosial dan ekonomi penduduk bumiputra, terutama di pedalaman, lalu menyampaikannya kepada pemerintah Hindia Belanda (Muryanti, 2010:24–25). Semua kegiatan itu

dijalankan dengan semangat kesetiakawanan dan agama Islam sebagai faktor pemersatu (Muryanti, 2010:26).

Dalam kerangka *'ashabiyyah*, keempat kegiatan itu menunjukkan bagaimana ikatan keislaman diubah menjadi kerja sama yang nyata. Ibn Khaldun (1967) menempatkan solidaritas kelompok sebagai dasar kekuatan bersama, dan agama dapat memperkuatnya dengan menyatukan hati para pengikut. Di SI, kesetiakawanan itu tidak berhenti sebagai semboyan, melainkan tampak dalam bantuan penguburan, koperasi, sekolah, dan saluran pengaduan. Solidaritas semacam ini membuat persoalan organisasi menjadi persoalan anggota sehari-hari. Hal ini memberi dasar untuk memahami munculnya aksi di tingkat cabang yang dibahas pada bagian ketiga.

Koperasi dan Persaingan: Kasus Brondongan

Peran ekonomi SI juga melahirkan gesekan. Di kampung Brondongan, Semarang, pada 24 Maret 1913 terjadi perkelahian antara anggota SI dan seorang penjual tahu dan nasi bernama Liem Mau Sing. Warungnya semula laris karena buruh perusahaan di dekatnya menjadi pelanggan, tetapi setelah buruh itu masuk SI dan mendirikan toko serta koperasi, warungnya sepi dan ia mulai membenci orang-orang SI. Akibat kerusuhan itu, pemerintah Belanda tidak segera mengakui SI sebagai badan hukum (Muryanti, 2010:22–23). Kasus ini memperlihatkan dua hal. Pertama, koperasi dan toko anggota benar-benar mengubah pola perdagangan di tingkat kampung. Kedua, persaingan ekonomi di tingkat bawah dapat berpengaruh pada sikap pemerintah kolonial terhadap SI, sehingga peran ekonomi SI dan sikap politik kolonial terhadapnya saling berkaitan.

Peran Oetoesan Hindia bagi Ekonomi Bumiputra

Pers SI turut berperan dalam wadah ekonomi tersebut. Pecahnya Perang Dunia I menghambat impor barang Eropa ke Hindia Belanda, sehingga permintaan terhadap produk lokal meningkat dan peluang usaha bagi pengusaha bumiputra terbuka. Dalam keadaan itu, *Oetoesan Hindia*, organ resmi SI pimpinan Tjokroaminoto, berfungsi ganda sebagai corong perjuangan politik sekaligus ruang promosi usaha bumiputra melalui kolom iklan. Edisi 1914–1918 memuat tujuh kategori usaha dalam iklan, yaitu tekstil dan batik, obat-obatan tradisional, perdagangan umum, jasa profesional, perhotelan dan transportasi, perbankan dan asuransi, serta hiburan modern, dengan penerapan strategi pemasaran seperti pembayaran di tempat (*rembours*), garansi produk, dan obral berbatas waktu (Nirmalasari, 2026). Selain itu, *Oetoesan Hindia* juga memberitakan kritik

terhadap pemerintah kolonial, persoalan sosial-ekonomi bumiputra, dan upaya membangun kesadaran politik (Salsabila, 2026).

Iklan-iklan itu menunjukkan bahwa solidaritas SI tidak hanya berupa bantuan antaranggota, tetapi juga jaringan ekonomi yang lebih luas. Surat kabar menghubungkan pengusaha bumiputra dengan pembacanya, sementara kolom beritanya menyatukan pembaca dalam satu ruang wacana. Dengan kata lain, pers menjadi infrastruktur solidaritas. Pada saat yang sama, fungsi ganda itu membuat *Oetoesan Hindia* mudah diamati pihak kolonial, karena satu media memuat iklan dagang sekaligus kritik politik, seperti terlihat pada bagian ketiga.

Keluhan Sosial dan Persoalan Tanah

Persoalan sosial-ekonomi bumiputra juga tampak di tingkat cabang. Kehidupan rakyat Semarang digambarkan miskin akibat sewa tanah, mahalnya harga beras, dan lingkungan tempat tinggal yang kumuh dan tidak sehat. Pada 23 Desember 1917, SI Semarang mengadakan rapat anggota yang membahas keluhan penduduk di tanah partikelir. Penduduk di tanah-tanah milik Oie Tiong Ham dikenai sewa f 0,50 sampai f 0,25 (Muryanti, 2010:28–30). Persoalan tanah partikelir, perkebunan tebu, dan nasib buruh juga dibahas pada Kongres Nasional di Batavia pada Oktober 1917 (Setiawati dkk., 2020). Atas dasar keluhan itu, SI Semarang memperjuangkan agar tanah partikelir dibeli pemerintah, dan melalui keputusan pemerintah tertanggal 9 November 1918 beberapa tanah partikelir di sekitar Semarang diputuskan untuk dibeli (Muryanti, 2010:30–33).

Rangkaian ini menunjukkan bahwa keluhan yang dihimpun SI di tingkat cabang naik menjadi agenda kongres nasional, lalu menjadi tuntutan kepada pemerintah. Peran sosial-ekonomi SI karenanya tidak terpisah dari peran politiknya. Keluhan tentang sewa tanah, harga beras, dan nasib buruh adalah bahan yang kemudian dipakai untuk menuntut perubahan. Hasilnya pun tidak seragam. Menurut Muryanti (2010:31–33), tuntutan menurunkan harga beras dan mengurangi area perkebunan yang diajukan pada Oktober 1918 tidak ditanggapi pemerintah, sedangkan pembelian sebagian tanah partikelir diputuskan pada bulan berikutnya. Tanggapan yang selektif ini perlu dicatat karena berkaitan dengan perdebatan tentang seberapa jauh jalan kerja sama dapat menghasilkan perbaikan, yang dibahas berikut.

Bentuk Perlawanan dan Perbedaan Strategi Politik Sarekat Islam

Retorika Pers dan Pengawasan Kolonial

Perlawanan bumiputra melalui SI tidak selalu berbentuk terbuka. Ia juga hadir dalam retorika pers dan dalam tafsir yang saling bertentangan atas ucapan politik. Hal ini terlihat dalam surat kabar sezaman *Bredasche Courant* terbitan 17 Juli 1914, pada rubrik "Van de Sarekat Islam" (Gambar 1). Artikel itu mengutip *Soerabaiasch Handelsblad* yang melaporkan bahwa pihak kehakiman telah memperhatikan sebuah ucapan dalam *Oetoesan Hindia*, yang disebut sebagai organ utama SI. Terjemahan yang disebut tepat dari ucapan itu adalah "*Lang leve het Koninkrijk Holland*" (Hidup Kerajaan Belanda). Redaksi mengaku mencatat keterangan itu, tetapi menilai *Oetoesan Hindia* tidak menanggapi persoalan terjemahan dan hanya mencela orang yang memberi bahan tulisan tersebut. Redaksi juga menyatakan bahwa *Oetoesan Hindia* berulang kali memuat tulisan yang bersifat menghasut, tidak secara langsung, melainkan dengan "setengah kata", dan menganjurkan kehakiman tetap waspada (*Bredasche Courant*, 17 Juli 1914).



Van de Sarekat Islam.

Het *Soer Hbl.* meldde, naar aanleiding van hetgeen het blad schreef over eene uitlating in de *Oetoesan Hindia*, hoofdorgaan van de Sarekat Islam, te hebben vernomen dat de justitie haar aandacht had geschonken aan het bedoelde artikel in laatstgenoemd blad. Intusschen deelde men het *Soer. Hbl.* mede, dat de juiste vertaling van bedoelde uitlating was: «Lang leve het Koninkrijk Holland». Hierbij teekende het blad aan:

«Wij nemen van deze mededeeling akte, maar zijn toch wel eenigermate verbaasd, dat *Oetoesan Hindia*, ons entrefilet besprekend, met geen enkel woord rept van de beweerde foutieve vertaling, maar enkel den «verrader» uitscheldt, die ons het stukje leverde. Dat geeft toch wel te denken, meenen wij. Trouwens *Oetoesan Hindia* bevat herhaaldelijk artikeltjes van opruiende strekking. Dit opruien geschiedt niet rechtstreeks, maar op de door Douwes Dekker geïnitieerde wijze met een half woord, dat voor den goeden verstaander genoeg is. Oplettendheid blijve dus der justitie aanbevolen».

Gambar 1: Rubrik “Van de Sarekat Islam” dalam *Bredasche Courant*, 17 Juli 1914.

Sumber: Delpher.

Sumber ini ditulis dari sudut pandang kolonial, sehingga lebih menggambarkan bagaimana pers SI diawasi dan ditafsirkan sebagai ancaman daripada apa yang dimaksud

oleh SI sendiri. Artikel itu juga bukan teks asli *Oetoesan Hindia*, melainkan kutipan melalui koran lain, sehingga rumusan ucapan yang dimuat bisa berbeda dari aslinya. Ucapan itu, dalam terjemahan yang dianggap tepat, berbunyi pernyataan setia, tetapi redaksi tetap menilai surat kabar itu menghasut secara tidak langsung. Di sini tampak bahwa batas antara ungkapan setia dan ungkapan melawan ikut ditentukan oleh cara pihak kolonial menafsirkannya.

Sebagai pembanding, *Het Koloniaal Weekblad* nomor 2 tanggal 8 Januari 1914, terbitan Den Haag, juga menyebut *Oetoesan Hindia* sebagai organ SI dalam artikel "Van bedenkelijke Moraal". Menurut laporan itu, ketua SI Surabaya meminta bupati bertindak terhadap sebuah surat edaran yang ditulis Mas Prio di Prodjo. Laporan itu juga menyebut bahwa Prio mengajukan pengaduan ke pihak kehakiman terhadap *Oetoesan Hindia*, dan mengutip edisi surat kabar itu pada 20 Oktober. Artikel tersebut menyajikan pimpinan SI sebagai pihak yang dicurigai secara moral dan keuangan, meskipun tuduhan-tuduhan itu disajikan sebagai laporan, bukan sebagai fakta yang terbukti (*Het Koloniaal Weekblad*, 8 Januari 1914).

Kedua sumber kolonial sezaman itu menunjukkan pola yang sama. *Oetoesan Hindia* disebut dalam konteks pengaduan, kecurigaan, dan pengawasan, dan keduanya dilaporkan melalui kacamata pihak yang berkepentingan menjaga ketertiban kolonial. Karena keduanya berasal dari pers kolonial dan tidak memuat teks asli *Oetoesan Hindia*, temuan ini tidak dapat dipakai untuk menyimpulkan isi sebenarnya tulisan SI. Gambaran dari sisi pergerakan datang dari kajian yang meneliti langsung surat kabar itu, yang menilai *Oetoesan Hindia* berfungsi sebagai sarana perlawanan intelektual terhadap kolonialisme (Salsabila, 2026). Pada 1914 juga, sejumlah pegawai pemerintah Belanda mulai menjalankan tekanan tidak resmi agar pribumi yang menjadi pegawai pemerintah tidak masuk SI (Muryanti, 2010:23). Dari sini terlihat bahwa respons bumiputra melalui SI sejak awal berhadapan dengan pengawasan dan kecurigaan kolonial.

Respons Konfrontatif: Aksi dan Tuntutan di Tingkat Cabang

Di tingkat cabang, respons bumiputra tampak dalam bentuk penolakan dan tuntutan yang lebih terbuka. Pada Oktober 1915, anggota SI di Simongan menolak membantu dan memberi keterangan kepada petugas yang bertugas mengukur ulang tanah. Pada 1917, SI Semarang mengadakan demonstrasi, pemogokan buruh, dan rapat terbuka bersama ISDV, dengan tuntutan antara lain pembelian kembali tanah partikelir, pengurangan tanaman tebu, dan batas harga beras. Pada 10 Oktober 1918, kongres SI

Semarang yang dihadiri 3.000 orang menuntut Gubernur Jenderal menurunkan harga beras dan mengurangi area perkebunan, tetapi pemerintah kolonial tidak menanggapi. Kongres Nasional ketiga di Surabaya (29 Oktober 1918) bersikap menentang pemerintah dalam hal perlindungan terhadap kapitalisme dan menyepakati bahwa SI akan mengorganisasi kaum buruh (Muryanti, 2010:31–33).

Urutan ini memperlihatkan bagaimana solidaritas di tingkat cabang diterjemahkan menjadi aksi. Pada 1915 bentuknya masih penolakan bersama untuk membantu petugas. Pada 1917 bentuknya menjadi demonstrasi, pemogokan, dan rapat terbuka. Pada 1918 bentuknya menjadi tuntutan langsung kepada Gubernur Jenderal dan, di tingkat nasional, sikap menentang perlindungan terhadap kapitalisme. Bahan solidaritasnya adalah kepentingan sehari-hari anggota, yaitu sewa tanah, harga beras, dan nasib buruh. Ketika kepentingan itu bertemu dengan pengaruh sosialisme-revolusioner yang dibawa ISDV, ikatan keislaman tidak lagi menjadi satu-satunya dasar solidaritas. Istilah konfrontatif di sini juga tidak berarti perlawanan bersenjata. Bentuknya tetap tuntutan, rapat, demonstrasi, dan pemogokan.

Respons Kooperatif: Tuntutan Melalui Saluran Pemerintah

Di sisi lain, jalur kerja sama dengan pemerintah juga ditempuh. Pada kongres 1916, Tjokroaminoto menyatakan bahwa SI bekerja bersama dan mendukung pemerintah untuk menuntut hal-hal yang baik (Muryanti, 2010:30). Ia kemudian diangkat sebagai anggota Volksraad mewakili SI pada 23 Februari 1918, setelah meminta pendapat anggota SI di Jawa dan Madura melalui pemungutan suara (Setiawati dkk., 2020). Volksraad sendiri adalah dewan perwakilan terbatas bentukan pemerintah kolonial yang mulai bersidang pada 1918 (Ricklefs, 2008). Abdul Muis menyetujui Volksraad sebagai sarana membela hak rakyat melalui jalur parlementer, dan menyetujui pula gagasan *Indie Weerbaar* (Setiawati dkk., 2020).

Respons kooperatif ini tidak berarti SI menyerah. Pemungutan suara di antara anggota di Jawa dan Madura menunjukkan bahwa keputusan menyangkut Volksraad diperlakukan sebagai keputusan organisasi, sehingga solidaritas anggota tetap dilibatkan. Persoalan yang dibawa lewat jalur ini pun sejalan dengan persoalan di tingkat cabang, misalnya tanah partikelir yang dibahas pada kongres 1916 dan 1917. Yang berbeda adalah cara menyampaikannya, yaitu lewat kongres, permohonan, dan lembaga bentukan pemerintah, bukan lewat pemogokan atau demonstrasi.

Perbedaan Strategi dan Solidaritas Organisasi

Perbedaan cara menghadapi pemerintah kolonial akhirnya tampak di dalam SI sendiri. Pada Kongres Nasional kedua di Batavia (Oktober 1917), Abdul Muis dan Semaun berselisih tentang Volksraad. Abdul Muis menyetujuinya sebagai sarana membela hak rakyat melalui jalur parlementer, sedangkan Semaun menyebutnya "pertunjukan kosong". CSI tetap memutuskan ikut serta dan mengirim calon. Keduanya juga berbeda tentang *Indie Weerbaar*. Abdul Muis menyetujuinya, sedangkan Semaun berusaha menolak mosi tetapi gagal. Sejak 1917 sudah tumbuh benih perpecahan, dan pertentangan itu berlanjut pada Kongres Nasional 1918 dengan perdebatan soal agama, nasionalisme, dan kapitalisme (Setiawati dkk., 2020).

Perbedaan itu berkaitan dengan radikalisasi SI Semarang. Semaun menjadi ketua SI Semarang pada 6 Mei 1917 dan mulai merencanakan kritik tajam terhadap pemerintah kolonial. Pengaruh sosialisme-revolusioner dibawa oleh Sneevliet melalui ISDV dan VSTP, dengan strategi masuk ke dalam tubuh SI yang dikenal sebagai blok di dalam. Dalam menghadapi pemerintah, SI Semarang terbagi antara kubu Semaun yang lebih radikal dan kubu Abdul Muis yang lebih kooperatif (Muryanti, 2010:23–29). Perpecahan itu baru menghasilkan SI Merah dan SI Putih pada 1921 (Setiawati dkk., 2020), di luar rentang waktu tulisan ini. Hubungan antara ISDV dan SI Semarang, termasuk strategi blok di dalam, juga dibahas dalam kajian tentang awal komunisme di Indonesia (McVey, 1965).

Tabel 2 merangkum perbedaan kedua ragam respons itu. Perbedaan tersebut tidak dapat dikembalikan pada watak tokoh semata. Ia berakar pada perbedaan dasar solidaritas dan pada hubungan masing-masing pihak dengan pemerintah. Bagi pimpinan pusat, solidaritas dijaga dengan menegaskan Islam sebagai pengikat dan dengan menempuh saluran yang tidak memutus hubungan dengan pemerintah, apalagi pengakuan hukum bagi CSI baru diperoleh pada 1916. Bagi SI Semarang, solidaritas tumbuh dari kepentingan buruh dan penduduk tanah partikelir yang bersinggungan langsung dengan sewa tanah, harga beras, dan perkebunan tebu, serta dari kerja sama dengan ISDV yang membawa bahasa sosialisme-revolusioner. Dengan dasar yang berbeda, ukuran keberhasilan pun berbeda. Jalur parlementer bernilai bagi mereka yang mengutamakan pengakuan dan ruang bersuara, tetapi tampak sebagai "pertunjukan kosong" bagi mereka yang menuntut perubahan atas harga beras dan tanah.

Tabel 2. Perbandingan Ragam Respons Kooperatif dan Konfrontatif dalam SI, 1912–1918

Aspek	Respons kooperatif	Respons konfrontatif
Pelaku utama	Pimpinan CSI (Tjokroaminoto) dan kubu Abdul Muis	SI Semarang di bawah Semaun, bersama ISDV (strategi blok di dalam)
Bentuk tindakan	Menyampaikan keluhan dan tuntutan kepada pemerintah; keterlibatan dalam Volksraad (1918); persetujuan terhadap *Indie Weerbaar*	Penolakan membantu petugas (Simongan, 1915); demonstrasi, pemogokan, dan rapat terbuka (1917); tuntutan kepada Gubernur Jenderal (1918)
Sikap terhadap pemerintah	Mendukung pemerintah untuk menuntut hal-hal yang baik; Volksraad sebagai jalur parlementer	Volksraad disebut "pertunjukan kosong"; kritik tajam terhadap pemerintah dan perlindungan terhadap kapitalisme
Dasar solidaritas	Islam sebagai unsur penyatu seluruh cabang	Kepentingan buruh dan penduduk tanah partikelir; pengaruh sosialisme-revolusioner
Tanggapan pemerintah	Tjokroaminoto diangkat sebagai anggota Volksraad (Februari 1918)	Tuntutan harga beras dan perkebunan tidak ditanggapi; sebagian tanah partikelir diputuskan dibeli (November 1918)

Sumber: diolah dari Muryanti (2010) dan Setiawati dkk. (2020).

Kedua ragam respons itu juga tidak terpisah secara tegas. Kongres Nasional ketiga di Surabaya pada Oktober 1918 bersikap menentang pemerintah dalam hal perlindungan terhadap kapitalisme dan menyepakati bahwa SI akan mengorganisasi buruh, padahal pada Februari tahun yang sama Tjokroaminoto telah diangkat sebagai anggota Volksraad. Artinya, dua ragam respons hadir bersamaan di dalam satu organisasi, bahkan pada tingkat pimpinan nasional. Sikap pemerintah kolonial ikut membentuk keadaan ini. Pengakuan hukum bagi CSI yang tertunda sampai 1916, tuntutan harga beras dan perkebunan yang tidak ditanggapi pada 1918, dan pengawasan terhadap pers SI yang tampak dalam sumber 1914 memberi alasan bagi kedua kubu untuk menguatkan sikapnya. Kubu kooperatif dapat menunjuk pada keputusan pembelian tanah partikelir dan kursi di Volksraad, sedangkan kubu konfrontatif dapat menunjuk pada tuntutan yang tidak dijawab. Pembacaan ini bersifat interpretatif dan perlu diuji dengan sumber primer dari pihak SI sendiri.

Dari sudut *'ashabiyyah*, perbedaan strategi ini menunjukkan batas ikatan keislaman sebagai pengikat tunggal. Islam tetap dijadikan unsur penyatu ketika kecurigaan antarcabang muncul pada 1915, tetapi pada 1917–1918 perselisihan menyangkut hal yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan menegaskan ikatan itu, yaitu sikap terhadap Volksraad, *Indie Weerbaar*, dan kapitalisme. Dalam rentang 1912–1918, solidaritas itu cukup kuat untuk menggerakkan anggota dalam jumlah besar, tetapi belum cukup untuk menyatukan strategi menghadapi pemerintah kolonial.

KESIMPULAN

Sarekat Islam (SI) berkembang dari Sarekat Dagang Islam (SDI), yang pada awalnya berupa perkumpulan pedagang muslim yang berkaitan dengan persaingan dagang melawan pedagang Tionghoa. Pada 1912 SDI berubah menjadi SI dengan cakupan yang lebih luas, tidak lagi hanya pedagang tetapi seluruh golongan masyarakat bumiputra, dan dengan arah gerak yang meluas dari ekonomi ke persoalan sosial dan politik. Perkembangan itu berlangsung pesat, tetapi pemerintah kolonial bersikap hati-hati, antara lain dengan hanya mengakui cabang-cabang yang berdiri sendiri dan baru mengakui pengurus pusat pada 1916. Kongres Nasional 1916 menunjukkan arah menuju pemerintahan sendiri, meskipun pada tahap itu SI masih menjaga hubungan kerja sama dengan pemerintah kolonial.

SI juga menjadi wadah bagi masyarakat bumiputra dalam menghadapi persoalan ekonomi dan sosial kolonial. Melalui prinsip saling menolong, koperasi usaha anggota, sekolah berdasar agama Islam, dan penyampaian keluhan kepada pemerintah, SI menyatukan anggotanya dengan Islam sebagai pengikat solidaritas. Surat kabar pergerakan seperti *Oetoesan Hindia* berfungsi ganda sebagai corong politik dan ruang promosi usaha bumiputra pada masa Perang Dunia I, sedangkan di tingkat cabang seperti Semarang, SI menyuarakan keluhan tanah partikelir, harga beras, dan kehidupan rakyat yang miskin.

Temuan utama tulisan ini adalah bahwa respons SI terhadap kolonialisme pada 1912–1918 tidak tunggal, melainkan terbagi menjadi ragam kooperatif dan konfrontatif. Respons kooperatif ditempuh pimpinan pusat dan kubu Abdul Muis melalui pernyataan kerja sama, penyampaian tuntutan kepada pemerintah, dan keterlibatan dalam Volksraad. Respons konfrontatif tampak di tingkat cabang, terutama SI Semarang di bawah Semaun, melalui penolakan, demonstrasi, pemogokan, rapat terbuka, dan tuntutan kepada

Gubernur Jenderal, serta di tingkat nasional melalui sikap menentang perlindungan terhadap kapitalisme pada 1918. Keduanya bersumber dari solidaritas yang sama, tetapi bertumpu pada dasar yang berbeda, yaitu ikatan keislaman sebagai pemersatu bagi pimpinan pusat, dan kepentingan ekonomi buruh serta penduduk tanah partikelir, dengan pengaruh sosialisme-revolusioner, bagi SI Semarang. Perbedaan itu tampak dalam perselisihan tentang Volksraad dan *Indie Weerbaar* pada 1917 dan menumbuhkan benih perpecahan yang baru berujung pada SI Merah dan SI Putih pada 1921. Sumber primer sezaman, yaitu *Bredasche Courant* (17 Juli 1914) dan *Het Koloniaal Weekblad* (8 Januari 1914), menunjukkan bahwa pers SI sejak awal diawasi dan ucapannya ditafsirkan sebagai ancaman oleh pihak kolonial, sehingga batas antara ungkapan setia dan perlawanan ikut ditentukan oleh penafsiran kolonial.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Sumber primernya baru dua artikel surat kabar kolonial yang sama-sama merujuk surat kabar lain dan bukan teks asli *Oetoesan Hindia*, dan belum mencakup dokumen kongres SI. Gambaran dari sisi SI diperoleh melalui kajian terdahulu. Penelitian lanjutan perlu menelusuri langsung edisi *Oetoesan Hindia* 1912–1918, laporan kongres SI, dan surat kabar sezaman lain, sehingga gambaran tentang perbedaan respons terhadap kekuasaan kolonial dapat diperkuat dengan sumber primer dari sisi SI sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Bredasche Courant. (1914, 17 Juli). Van de Sarekat Islam. Breda: W. van Bergen. Diakses dari Delpher.

Hajar, I. I., Hawari, M. H., & Rabbani, M. S. Dari Narasi ke Analisis: Peran Pendekatan dan Teori dalam Penelitian Sejarah.

Het Koloniaal Weekblad. (1914, 8 Januari). Van bedenkelijke Moraal. No. 2, Jaargang 14. 's-Gravenhage: Vereeniging "Oost en West". Diakses dari koleksi digital KITLV, Perpustakaan Universitas Leiden. https://kitlv-docs.library.leiden.edu/open/Metamorfoze/Kol.%20Weekblad/FINAL/MMKITLV01_PDF_TS694_1914_02.pdf

Ibn Khaldun. (1967). *The Muqaddimah: An introduction to history* (F. Rosenthal, Penerj.; ed. ke-2). Princeton: Princeton University Press.

Korver, A. P. E. (1982). *Sarekat Islam, 1912–1916: Opkomst, bloei en structuur van Indonesië's eerste massabeweging* (Amsterdamse Historische Reeks No. 3). Amsterdam: Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam.

Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar ilmu sejarah* (ed. rev.). Yogyakarta: Tiara Wacana.

McVey, R. T. (1965). *The rise of Indonesian communism*. Ithaca: Cornell University Press.

Muryanti, E. (2010). Muncul dan Pecahnya Sarekat Islam di Semarang 1913–1920. *Paramita: Historical Studies Journal*, 20(1), 21–35. https://journal.unnes.ac.id/nju/paramita/article/view/1056.

Nirmalasari, D. (2026). *Aktivitas Ekonomi Bumiputra dalam Iklan Surat Kabar Oetoesan Hindia di Surabaya (1914–1918)* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Diakses dari https://digilib.uinsgd.ac.id/136827/

Noer, D. (1973). *The modernist Muslim movement in Indonesia, 1900–1942*. Singapore: Oxford University Press.

Nurrohman, S. (2023). *Gerakan Sarekat Islam di Bandung dalam Pemberitaan Surat Kabar Kaoem Moeda, 1912–1918 M.* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Diakses dari https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68961/

Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (Eds.). (2008). *Sejarah nasional Indonesia V: Zaman kebangkitan nasional dan masa akhir Hindia Belanda* (ed. pemutakhiran). Jakarta: Balai Pustaka.

Ricklefs, M. C. (2008). *A history of modern Indonesia since c.1200* (4th ed.). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Salsabila, A. M. (2026). *Berita Pergerakan Nasional dan Solidaritas Islam pada Surat Kabar Oetoesan Hindia Tahun 1914–1920* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Diakses dari https://digilib.uinsgd.ac.id/137762/

Setiawati, Y., Samsudin, & Ahmad SM, A. (2020). Gerakan Politik Sarekat Islam di Jawa Tahun 1916–1921. *Historia Madania*, 4(2), 355–372. https://doi.org/10.15575/hm.v4i2.9502.

Shiraishi, T. (1990). *An age in motion: Popular radicalism in Java, 1912–1926*. Ithaca: Cornell University Press.